
**ANALISA FAKTOR PENGUNGKIT PADA ASPEK DIMENSI SOSIAL
BUDAYA DALAM RANGKA PENGELOLAAN HUTAN MANGROVE
YANG BERKELANJUTAN DI DESA ALUH ALUH BESAR KABUPATEN
BANJAR**

Eddy Elminsyah Jaya

eddy.elmiansyah@uniba-bpn.ac.id

Maslina

maslina@uniba-bpn.ac.id

Universitas Balikpapan, Indonesia

ABSTRACT

Banjar Regency is a district in South Kalimantan Province which is recorded as having a mangrove forest area. One of the villages that has mangrove forest potential is Aluh Aluh Besar Village. The aim of this research is to analyze lever factors in the context of sustainable mangrove forest management in the socio-cultural dimension. This research uses a quantitative and qualitative approach with a longitudinal design because it is sustainable over a relatively long period of time and follows an interactive process of various variables. The research results show that the largest leverage factor is ownership status with a value of 2.04 and the lowest is environmental knowledge (0.05). To measure sensitivity, a leverage analysis was carried out using 10 (ten) attributes. The conclusion from the research conducted shows that "Ownership Status" is the biggest lever in maintaining the sustainability of mangrove forests at the research location. "Ownership Status" is important because it is based on the causes of conversion or conversion of land resulting from the transfer of ownership from the community to investors or the community itself converting it to other economic activities. Land owners feel they have rights to the area they own. One important policy is to ensure ownership of land on which mangrove forests are "owned by the government". In addition to efforts to raise public awareness of the importance of mangrove forests to support the lives of local communities.

Keywords: Mangrove Forest, Sustainability, Leveraging Factors, Ownership Status, Function Transfer, Aluh Aluh Besar Village

ABSTRAK

Kabupaten Banjar merupakan Kabupaten di Provinsi Kalimantan Selatan yang tercatat mempunyai kawasan hutan mangrove. Salah satu desa yang memiliki potensi hutan mangrove adalah Desa Aluh aluh Besar Tujuan penelitian ini

adalah menganalisa faktor pengungkit dalam rangka keberlanjutan pengelolaan hutan mangrove pada aspek dimensi Sosial Budaya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif dengan desain longitudinal karena sifatnya berkelanjutan untuk jangka waktu yang relatif panjang dan mengikuti proses interaktif ragam variabel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Faktor Pengungkit yang terbesar adalah Status Kepemilikan dengan nilai 2.04 dan yang terendah adalah Pengetahuan terhadap Lingkungan (0.05). Untuk mengukur sensitifitas dilakukan Analisa *leverage* dengan menggunakan 10 (sepuluh) atribut. Kesimpulan dari penelitian yang dilakukan menunjukan "Status Kepemilikan" adalah Faktor Pengungkit terbesar dalam menjaga keberlanjutan hutan mangrove di lokasi penelitian. "Status Kepemilikan" menjadi penting karena dengan didasarkan pada penyebab konversi atau pengalihfungsian lahan akibat dari berpindahnya kepemilikan dari masyarakat ke investor ataupun masyarakat sendiri mengkonversinya ke aktivitas ekonomi lain. Pemilik lahan merasa memiliki hak atas kawasan yang dimilikinya tersebut. Salah satu kebijakan yang penting adalah memastikan kepemilikan lahan yang diatasnya hutan mangrove sebagai "milik pemerintah". Selain upaya penyadaran Masyarakat akan pentingnya hutan mangrove untuk menunjang kehidupan masyarakat sekitar.

Kata Kunci: Hutan Mangrove, Keberlanjutan, Faktor Pengungkit, Status Kepemilikan, Alih Fungsi, Desa Aluh Aluh Besar

PENDAHULUAN

Kabupaten Banjar merupakan Kabupaten di Provinsi Kalimantan Selatan yang tercatat mempunyai kawasan hutan mangrove. Kabupaten Banjar yang terletak di bagian selatan berada pada 2°49'55" dan 3°43'38" Lintang Selatan dan 114°30'20" serta 115°33'37" Bujur Timur dengan luas wilayah 4.668,50 km² atau sekitar 12,20% dari luas wilayah Provinsi Kalimantan Selatan. Kabupaten Banjar terdiri dari 277 desa. Dari 277 Desa ini yang memiliki kawasan hutan mangrove adalah

Desa Aluh Aluh Besar. Desa ini berada di pesisir pantai dengan kondisi berlumpur serta daerah peralihan antara perairan asin dan tawar (payau) yang merupakan habitat alami tumbuhan mangrove. (BPS Kabupaten Banjar, 2018).

Mangrove sendiri merupakan ekosistem unik yang menempati kawasan transisi di sekitar Pantai tropis maupun sub tropis dengan karakteristik yang khas adalah selalu dipengaruhi oleh pasang surut dan toleran terhadap salinitas tinggi (Jaya, 2020). Perpaduan antara ekosistem

daratan dan perairan menjadikan mangrove penuh dengan sumber daya produktif. Menurut Eddy E Jaya (2019) terdapat beberapa fungsi social ekonomi hutan mangrove meliputi daerah penangkapan ikan (*fishing ground*), kayu bangunan, kayu bakar, dermaga, kayu mebel, tiang pancang untuk bagan penangkap ikan serta atap huma. Sedangkan fungsi social budaya sebagai areal konservasi, Pendidikan, ekoturisme dan identitas budaya.

Produktifitas hutan mangrove yang tinggi inilah yang menyebabkan mangrove menjadi rentan akan ekstraksi dari aktivitas manusia seperti penebangan baik untuk keperluan kayu baka ataupun perubahan fungsi yang lain seperti pemukiman, tambak, industri maupun penambangan pasir. Banyak sekali upaya perbaikan hutan mangrove diantaranya rehabilitasi kawasan yang telah rusak. Meskipun demikian, bentuk perbaikan ini lebih banyak menunjukkan kegagalan dibandingkan keberhasilan karena dilakukan secara parsial dan tidak berkelanjutan (Jaya, Eddy E, 2022).

Pembangunan berkelanjutan (*suistanable development*) sebagaimana yang dirumuskan merupakan konsep Pembangunan yang mewujudkan kebutuhan saat ini tanpa mengurangi kemampuan generasi yang akan datang untuk mewujudkan

kebutuhan mereka. Hal ini diartikan dengan pemahaman dalam mengambil nilai mamfaat sumber daya mangrove untuk pemenuhan kebutuhan saat ini harus tetap menjaga kelestariannya dan tanpa mengurangi kemampuan generasi yang akan dalam pemenuhan kebutuhannya. Faktor social budaya adalah salah satu yang menjadi dominan dalam menjaga kelestarian dan keberlanjutan hutan mangrove.

Salah satu hutan mangrove yang juga rentan dalam pemamfaatan sumber daya dan pengalihfungsian oleh aktivitas manusia untuk kegiatan ekonomis adalah hutan mangrove di Desa Aluh Aluh Besar Kabupaten Banjar.

Atas dasar pemahaman terhadap permasalahan hutan mangrove diatas, maka perlu dilakukan Analisa Faktor Pengungkit Pada Aspek Sosial Budaya Dalam Rangka Pengelolaan Hutan Mangrove Yang Berkelanjutan di Desa Aluh Aluh Besar Kabupaten Banjar.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan hasil atas analisa faktor pengungkit dengan nilai yang terbesar dalam menjaga berkelanjutan Hutan Mangrove Desa Aluh Aluh Besar.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan Kawasan Hutan Mangrove yang beralamatkan di Desa Aluh Aluh Besar Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan. Sementara itu, penelitian dilaksanakan antara bulan Januari sampai dengan Februari 2024. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif dengan desain longitudinal karena sifatnya berkelanjutan untuk jangka waktu yang relatif panjang dan mengikuti proses interaktif ragam variabel. Teknik penarikan sampel dilakukan secara purposive sampling sesuai kepentingan analisis. Metode *analysis Multidimensional Scaling (MDS)* pendekatan *Rap-MangroveMCGI (Modifikasi RAPFISH)*. Pendekatan *Rap-MangroveMCGI* sekaligus juga akan menghasilkan analisis *leverage*. Analisis *Leverage* inilah yang digunakan untuk mengetahui factor pengungkit mana yang paling besar pengaruhnya akan keberlanjutan. Analisis *leverage* atribut-atribut pengelolaan Mangrove diarahkan untuk mengetahui atribut-atribut mana yang berpengaruh atau berperan yang memberikan kontribusi terhadap nilai keberlanjutan tersebut. Analisis sensitivitas ini menggunakan "*attribute leveraging*" untuk melihat perubahan dari hasil analisis MDS. Pengaruh setiap atribut

dilihat dalam bentuk perubahan *root mean square (RMS)*, khususnya pada sumbu x terutama pada skala berkelanjutan sumberdaya dan perubahan sumbu y tidak diperhitungkan. Hal ini dikarenakan hanya untuk melihat perubahan RMS. Rumus RMS tersebut adalah:

$$RMS = \sqrt{\left[\frac{\sum_{i=1}^n \{Vf(i,1) - Vf(,1)\}^2}{n} \right]}$$

dimana :

$Vf(i,1)$ = nilai hasil MDS (setelah rotasi dan *flipping*); dan $Vf(,1)$ = nilai tengah hasil MDS pada Kolom ke-1.

Analisis *Leverage* atau analisis ini berguna untuk mengetahui efek stabilitas jika salah satu atribut dihilangkan saat dilakukannya ordinasi. Untuk sebanyak M atribut, maka analisis *Leverage* dilakukan M+1 kali penghitungan, yaitu 1 kali penghitungan terhadap seluruh atribut (M atribut) dan M kali terhadap salah satu atribut jika dihilangkan. Sebelum dilakukan analisis, terlebih dahulu dilakukan standardisasi atribut untuk menyamakan skala pada skor masing-masing atribut. Hasil analisis *Leverage* ini akan menunjukkan persentase (%) perubahan *root mean square* masing-masing atribut jika dihilangkan dalam ordinasi. Atribut yang memiliki persentase tertinggi merupakan atribut yang paling sensitif/berpengaruh kuat terhadap keberlanjutan (Kavanagh and Pitcher, 2004).

Sebagai dasar dari data untuk analisa faktor pengungkit untuk status keberlanjutan ini menggunakan sampel

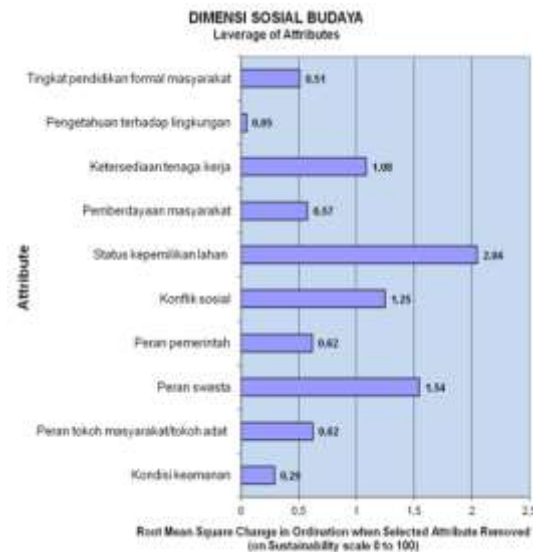
yang berasal dari pihak berkepentingan (*stakeholder*) sebanyak 25 orang.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Analisis *Leverage* keberlanjutan dimensi sosial Budaya dalam Pengelolaan Hutan Mangrove di Hutan Mangrove Desa Aluh-aluh Besar Kabupaten Banjar

Atribut-atribut dimensi sosial budaya yang dipertimbangkan mampu memberikan pengaruh terhadap status keberlanjutan dalam pengelolaan mangrove di Desa Aluh-aluh Besar Kabupaten Banjar, terdiri dari 10 (sepuluh) atribut, yakni (1) tingkat pendidikan formal masyarakat; (2) pengetahuan terhadap lingkungan; (3) ketersediaan tenaga kerja; (4) pemberdayaan masyarakat; (5) status kepemilikan lahan; (6) konflik sosial; (7) peran pemerintah; (8) peran swasta; (9) peran tokoh masyarakat/tokoh adat; dan (10) kondisi keamanan.

Adapun hasil perhitungan faktor pengungkit yang diduga berpengaruh terhadap keberlanjutan hutan mangrove dapat dilihat dari hasil analisis *leverage*. dimensi sosial budaya sebagaimana hasil olahan *Rap-MangroveMCGI* dapat dilihat pada Gambar 1 di bawah ini.



Sumber : Analisis Data Primer (2024)

Gambar 1

Analisis *leverage* dimensi Sosial Budaya dalam pengelolaan hutan mangrove di Hutan Mangrove Desa Aluh aluh Besar Kabupaten Banjar

Gambar diatas menunjukkan menjelaskan bahwa hasil *leverage of attributes* dimensi sosial budaya yang merupakan atribut sensitif dan akan mempengaruhi keberlanjutan pengelolaan mangrove di Hutan Mangrove Desa Aluh Aluh Besar . Adapun atribut-atribut sensitif tersebut secara berurutan adalah status kepemilikan lahan (2,04), peran swasta (1,54), konflik sosial (1,25), ketersediaan tenaga kerja (1,08), peran tokoh masyarakat/tokoh adat (0,62) dan peran pemerintah (0,62).

Tidak tersedianya zonasi untuk berbagai tujuan pengelolaan hutan mangrove di di Hutan Mangrove Desa Aluh aluh Besar merupakan

salah satu indikator yang perlu diperhatikan dalam upaya menghindari konflik sosial dalam pemanfaatan lahan. Artinya, pemerintah perlu turun tangan untuk menetapkan zonasi untuk berbagai tujuan pengelolaan hutan mangrove.

Kemampuan masyarakat tradisional dalam memecahkan masalah-masalah dalam pengelolaan sumberdaya alam yang semakin terbatas dapat masuk dalam kerangka konservasi hutan mangrove. Kemampuan ini lebih dikenal dengan sebutan sistem pengetahuan masyarakat setempat (*local knowledge system*). Kemampuan ini berkembang bukan hanya terbatas kepada bagaimana memanfaatkan hutan adat mereka, tetapi juga penyerapan teknologi pola pertanian tradisional (perladangan) termasuk pola agroklimatologi yang khusus disetiap tempat.

Pengelolaan mangrove di Hutan Mangrove Desa Aluh aluh Besar dengan berbagai permasalahannya ternyata belum cukup mampu menarik totalitas peran pemerintah khususnya Pemerintah Kabupaten Banjar. Hal ini ditunjukkan dengan. Belum terlihat peran pemerintah secara nyata dalam pengelolaan mangrove di Hutan Mangrove Desa Aluh Aluh Besar.

Perlunya Pemerintah dalam mengambil kebijakan dalam hal

menguasai "Status Kepemilikan" akan kawasan mangrove sehingga tidak bisa lagi dirubah fungsinya oleh pihak lain serta diharapkan dapat menjaga fungsi hutan mangrove sesuai dengan fungsi alami dasarnya yang dapat menunjang kehidupan masyarakat sekitar.

KESIMPULAN

Atas dasar hasil dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa faktor pengungkit berdasarkan Analisa *leverage* diatas yang terbesar adalah "Status Kepemilikan Lahan. Status Kepemilikan Lahan menjadi yang terbesar sebagai faktor pengungkit. Hal ini didasarkan pada penyebab konversi atau pengalihfungsian lahan akibat dari berpindahnya kepemilikan dari masyarakat ke investor ataupun Masyarakat sendiri mengkonversinya ke aktivitas ekonomi lain. Pemilik lahan merasa memiliki hak atas kawasan yang dimilikinya tersebut Perlunya memastikan kepemilikan mangrove sebagai "milik pemerintah" sebagai salah satu kebijakan pemerintah disamping penegasan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Selain itu perlu upaya membangun kesadaran bersama akan pentingnya keberadaan mangrove yang nantinya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar bahkan pihak

swasta akan pentingya hutan mangrove untuk mendukung kehidupan sekitar.

DAFTAR PUSTAKA

- BPS Kabupaten Banjar. (2018). Kecamatan Dalam Angka. BPS Kecamatan Aluh-Aluh Kabupaten Banjar
- Donato, D. C., Kauffman, J. B., Murdiyarso, D., Kurnianto, S., Stidham, M., & Kanninen, M. (2012). Mangrove adalah salah satu hutan terkaya karbon di kawasan tropis. *Brief Cifor*, 12, 1-10. [Google Scholar](#)
- Gedan, K. B., Kirwan, M. L., Wolanski, E., Barbier, E. B., & Silliman, B. R. (2011). The present and future role of coastal wetland vegetation in protecting shorelines: answering recent challenges to the paradigm. *Climatic Change*, 106(1), 7-29. [Google Scholar](#)
- Gunawijaya, R. (2017). Kebutuhan manusia dalam pandangan ekonomi kapitalis dan ekonomi Islam. *Jurnal Al-Maslahah*, 13(1), 131-150. [Google Scholar](#)
- H Hermanto Suaib, M. M. (2017). Suku Moi: nilai-nilai kearifan lokal dan modal sosial dalam pemberdayaan masyarakat. *An1mage*. [Google Scholar](#)
- Harahap, I. (2019). Ekonomi pembangunan: pendekatan transdisipliner. [Google Scholar](#)
- Jaya, Eddy E. "Kajian Keberlanjutan Pengelolaan Hutan Mangrove Di Mangrove Center Graha Indah (Mcgi) Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur." *IDENTIFIKASI: Jurnal Ilmiah Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lindungan Lingkungan* 5.1 (2019): 1-18. [Google Scholar](#)
- Jaya, E. E., SH, S. E., & Pi, S. (2020). Skenario berkelanjutan pengelolaan hutan mangrove: Studi kajian di Mangrove Center Graha Indah Balikpapan. *Nas Media Pustaka*. [Google Scholar](#)
- Jaya, E. E. (2022). Analisis Sensitivitas dan Status Keberlanjutan Untuk Dimensi Ekonomi Dalam Pengelolaan Kawasan Ekowisata Mangrove Pagatan Besar. *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 7(9), 14803-14811. [Google Scholar](#)
- Kavanagh P. 2001. Rapid Appraisal of Fisheries (Rapfish) Project. Rapfish Software Description (for Microsoft Exel). University of British Columbia, Fishries Centre. Vancouver.
- Kristiyanti, M. (2016). Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Pantai Melalui Pendekatan ICZM

- (Integrated Coastal Zone Management). [Google Scholar](#)
- Lestari, M. M. (2013). Potensi Dan Tantangan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan Dalam Penciptaan Masyarakat Pesisir Yang Siap Menjawab Perkembangan Zaman. *Jurnal Selat*, 1(1), 8–12. [Google Scholar](#)
- Murdiyarso, D., Purbopuspito, J., Kauffman, J. B., Warren, M. W., Sasmito, S. D., Donato, D. C., Manuri, S., Krisnawati, H., Taberima, S., & Kurnianto, S. (2015). The potential of Indonesian mangrove forests for global climate change mitigation. *Nature Climate Change*, 5(12), 1089–1092. [Google Scholar](#)
- Purnobasuki, H. (2012). Pemanfaatan hutan mangrove sebagai penyimpan karbon. *Buletin PSL Universitas Surabaya*, 28(3–5), 1–6. [Google Scholar](#)
- Purwowibowo, S. A. N. (2016). Hutan Mangrove Pasar Banggi Rembang: Rehabilitasi, Community Development dan Pemimpin Informal. *Pandiva Buku*. [Google Scholar](#)
- Puryono, S. (2018). Pelestarian hutan mangrove dan peran serta masyarakat pesisir. *Undip Press*. [Google Scholar](#)
- Saefulrahman, I. (2015). Kepemimpinan, Modal Sosial, dan Pembangunan Desa (Kasus Keberhasilan Pembangunan di Desa Pangauban Kecamatan Cisurupan Kabupaten Garut). *CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 1(1), 149–166. [Google Scholar](#)
- Saridan, A., & Soegiharto, S. (2012). Struktur tegakan tinggal pada uji coba pemanenan di hutan penelitian labanan, kalimantan timur. *Jurnal Penelitian Hutan Dan Konservasi Alam*, 9(3), 239–249. [Google Scholar](#)
- Supriadi, S., Romadhon, A., & Farid, A. (2015). Struktur Komunitas Mangrove di Desa Martajasah Kabupaten Bangkalan. *Jurnal Kelautan: Indonesian Journal of Marine Science and Technology*, 8(1), 44–51. [Google Scholar](#)
- Suryanti, S., Supriharyono, S., & Anggoro, S. (2019). Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu. [Google Scholar](#)